

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Hubungan diplomatik antara Afghanistan dan Tiongkok terjalin sejak abad ke-18, ketika Afghanistan diperintah oleh Ahmad Shah Durrani dan Tiongkok oleh Qianlong. Namun hubungan perdagangan antara negara-negara ini setidaknya sudah ada sejak Dinasti Han dengan Jalur Sutra yang menguntungkan Dinasti Han mengalahkan Dayuan dalam perang Han-Dayuan sehingga membangun kendali Tiongkok atas sebagian Afghanistan utara. Kemudian dinasti Han mendirikan Protektorat Wilayah Barat untuk melindungi perdagangan Jalur Sutra melalui Asia Tengah. Hubungan perdagangan antara Afghanistan dan Tiongkok sebagian besar melibatkan perdagangan buah dan teh melalui karavan melalui Xinjiang dan Koridor Wakhan di perbatasan kedua negara. (Siddiqi 2020)

Selama abad ke-20, Tiongkok memberikan bantuan ekonomi dan pinjaman jutaan dolar untuk membangun Afghanistan pada periode awal Perang Dingin. Persahabatan ini sempat terputus setelah perpecahan Tiongkok-Soviet dan invasi Soviet ke Afghanistan (1979), dengan Uni Soviet memasang rezim pro-Soviet dan anti-Tiongkok di Afghanistan. Setelah Revolusi Saur di Afghanistan, Tiongkok bereaksi negatif terhadap Republik Demokratik Afghanistan karena memandangnya sebagai kemajuan Soviet dan ancaman terhadap hubungan persahabatannya dengan Iran dan Pakistan. Beijing mengakui pemerintahan baru dua minggu setelah revolusi. Pada tanggal 27 Desember 1979, pasukan Soviet dikerahkan di Afghanistan. Pada tanggal 30 Desember, pemerintah Tiongkok mengeluarkan pengumuman yang mengutuk invasi militer Soviet, dan menolak mengakui pemerintahan Karmal yang didukung Soviet. Hubungan resmi dihentikan, dan kedutaan Tiongkok diturunkan menjadi kantor perwakilan, dan hanya menangani masalah konsuler dan visa. (Halliday 1980)

Selama perpecahan Sino-Soviet, ketegangan hubungan antara Tiongkok dan Uni Soviet mengakibatkan bentrokan perbatasan berdarah dan saling mendukung musuh-musuh lawan. Tiongkok dan Afghanistan memiliki hubungan netral satu sama lain selama pemerintahan Raja Mohammed Zahir Shah. Ketika Komunis Afghanistan yang pro-Soviet merebut kekuasaan di Afghanistan pada tahun 1978, hubungan antara Tiongkok dan komunis Afghanistan dengan cepat berubah menjadi permusuhan. Kelompok komunis Afghanistan yang pro-Soviet mendukung musuh Tiongkok saat itu, Vietnam, dan menyalahkan Tiongkok karena mendukung militan antikomunis Afghanistan. Tiongkok menanggapi perang Soviet di Afghanistan dengan mendukung mujahidin Afghanistan dan meningkatkan kehadiran militer mereka di dekat Afghanistan di Xinjiang. Tiongkok memperoleh

peralatan militer dari Amerika untuk mempertahankan diri dari serangan Soviet. Pada awal tahun 1980-an, Tiongkok memandang Afghanistan mempunyai risiko yang cukup tinggi karena hubungannya dengan Uni Soviet. (Starr 2015)

Penarikan pasukan Soviet dari Afghanistan adalah salah satu syarat yang didorong oleh Tiongkok meredakan tensi dalam hubungan Tiongkok-Soviet. Tiongkok melihat kehadiran Soviet sebagai ancaman regional terhadap dirinya sendiri (untuk mencegah Uni Soviet mengepung Tiongkok) dan ancaman terhadap sekutunya, Pakistan. Dengan kemungkinan dukungan Amerika Serikat, Tiongkok memasok senjata kepada gerilyawan Afghanistan yang melawan pemerintah boneka Soviet. (Fingar 2020)

Tiongkok menjauhkan diri dari Afghanistan setelah bangkitnya Taliban pada tahun 1990an. Tiongkok memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Taliban dan tidak mengakui pemerintahan Taliban. Khawatir dengan hubungan Taliban dengan organisasi teroris Turkistan Timur, kekhawatiran keamanan Tiongkok meningkat. Tiongkok juga khawatir bahwa kekacauan di Afghanistan dapat meluas hingga melintasi perbatasan negaranya. (Huasheng 2016) Atas dasar kekhawatirannya terhadap kekerasan di Xinjiang, Tiongkok mengirim delegasi untuk bertemu dengan Taliban pada awal tahun 1999. Pada bulan November 2000, duta besar Tiongkok untuk Pakistan, Lu Shulin, menjadi perwakilan senior pertama negara non-Muslim yang bertemu dengan Mullah Omar, pendiri Taliban. (Clarke, 2015)

Setelah jatuhnya rezim Taliban setelah intervensi Amerika Serikat pada tahun 2001, hubungan antara Tiongkok dan Afghanistan meningkat pesat dan dibangun kembali. Pada bulan Desember 2001, Tiongkok mengirimkan tim kerja Kementerian Luar Negeri ke Afghanistan, yang menghadiri upacara pendirian Pemerintahan Sementara Afghanistan dan mengirimkan pesan ucapan selamat kepada Presiden Hamid Karzai. Pembentukan pemerintahan baru Afghanistan mendekatkan kedua negara. Pada bulan Januari 2002, Presiden Karzai mengunjungi Tiongkok, dan bertemu masing-masing dengan Presiden Tiongkok Jiang Zemin dan Perdana Menteri Zhu Rongji. Kedua belah pihak bertukar catatan tentang Tiongkok yang memberikan bantuan material darurat sebesar 30 juta yuan dan uang tunai sebesar US\$1 juta ke Afghanistan. Presiden Jiang Zemin mengumumkan bahwa Tiongkok akan memberikan bantuan senilai US\$150 juta kepada Afghanistan untuk rekonstruksinya. Bantuan material darurat senilai 30 juta yuan telah dikirim ke Kabul pada akhir Maret 2002. Kedutaan Besar Tiongkok di Afghanistan dibuka kembali pada 6 Februari. (Huasheng 2016)

Pada Mei 2002, Menteri Luar Negeri Tiongkok Tang Jiaxuan mengunjungi Afghanistan. Dalam kunjungan tersebut, Menlu Tiongkok bertemu dengan Hamid Karzai, Ketua Pemerintahan Sementara Afghanistan dan mantan Raja Zahir Shah, serta mengadakan pembicaraan dengan tumpalannya Abdullah Abdullah. Kedua belah pihak menandatangani Perjanjian Kerja Sama Ekonomi dan Teknis senilai US\$30 juta Pada bulan November, Menteri Luar Negeri Afghanistan Abdullah mengunjungi Tiongkok. Selama kunjungannya, pihak Tiongkok dan Afghanistan bertukar catatan bahwa Tiongkok memberikan bantuan material sebesar US\$1 juta ke Afghanistan. Pada bulan Desember, Tiongkok, bersama dengan 5 negara tetangga Afghanistan lainnya menandatangani Deklarasi Kabul tentang Hubungan Tetangga yang Baik, menegaskan kembali komitmennya untuk menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Afghanistan dan untuk terus mendukung proses perdamaian dan rekonstruksi Afghanistan. (STONE, 2019)

Ketua Wu Bangguo dan Perdana Menteri Wen Jiabao. Kedua belah pihak menandatangani tiga dokumen kerja sama termasuk Perjanjian Kerja Sama Ekonomi dan Teknis, di mana Pemerintah Tiongkok memberikan hibah sebesar US\$15 juta kepada Pemerintah Afghanistan. (Wong, 2015) Setelah tahun 2012, Tiongkok mulai menempati posisi yang lebih menonjol dalam hubungan luar negeri Tiongkok dengan negara-negara tetangganya, khususnya di bawah kebijakan lingkungan baru Tiongkok yang ditetapkan pada tahun-tahun awal pemerintahan Xi Jinping. Presiden Hamid Karzai dan Ashraf Ghani mengunjungi Tiongkok masing-masing pada tahun 2013 dan Oktober 2014. (Huasheng 2016)

Sejak tahun 2017, Menteri Luar Negeri Wang Yi memprakarsai diplomasi ulang-alik antara Pakistan dan Afghanistan, yang selama perang berlangsung saling menuduh satu sama lain melakukan serangan dan pemboman. Ketiga negara—Tiongkok, Afganistan, dan Pakistan—telah sepakat untuk membentuk forum dialog trilateral dan menghidupkan kembali isu ini mengenai Afghanistan di Shanghai Cooperation Organisation. (Ramachandran, 2017)

Beberapa pihak mengklaim Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan akan menjadi cara paling efektif untuk mengintegrasikan Afghanistan ke dalam Belt Road Initiative (BRI) regional. (STONE, 2019) Untuk mengatasi ketidakstabilan regional, Tiongkok sejak tahun 2015 telah bergabung dengan Kelompok Koordinasi Segi Empat dan Format Moskow. Pada tahun 2015, Tiongkok menjadi tuan rumah negosiasi antara Taliban dan pejabat Afghanistan di ibu kota Xinjiang, Urumqi. (nytimes, 2019)

Hubungan Tiongkok dengan Taliban membaik sejak tahun 2014, ketika ISKP muncul di dan sekitar Afghanistan. Ketidakpercayaan Tiongkok sebelumnya terhadap Taliban berasal dari ketakutan Beijing terhadap pemberontakan Uighur di Xinjiang, yang mendorong Tiongkok menolak mengakui pemerintahan pertama Taliban (1996-2001). Selain periode ini, dan pemerintahan yang didukung Soviet pada tahun 1979-1989, Tiongkok selalu memiliki hubungan baik dengan tetangganya. Namun, kekhawatiran Tiongkok terhadap pemberontakan Uighur mendorong Tiongkok untuk mengizinkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1368 tanggal 12 September 2001, yang memicu aksi militer AS di Afghanistan, setelah serangan 9/11. Kemudian pada tahun 2000-an, ketika Tiongkok semakin memperoleh kekuasaan, Tiongkok semakin merasa tidak aman terhadap kehadiran AS di sepanjang perbatasan baratnya dengan Afghanistan. Oleh karena itu, Tiongkok memposisikan dirinya sebagai fasilitator perdamaian dan mulai mengembangkan hubungan baik dengan Taliban, sekaligus secara terbuka mendukung Republik Islam yang saat itu berdiri di Kabul. Tiongkok, dengan strateginya mengurangi kekerasan melalui diplomasi, investasi, dan proyek pembangunan, memandang keterlibatan militer AS sebagai ancaman geostrategis. (Small, 2015)

Peristiwa dimana Amerika Serikat memulai negosiasi dengan Taliban di bawah kepemimpinan presiden Donald Trump perlahan mulai mengubah perebutan kekuasaan di Afghanistan. Pada bulan Februari 2020, AS telah sepakat untuk menarik mundur pasukan militernya yang tersisa di Afghanistan dan pihak Taliban sendiri menyepakati untuk tidak membiarkan kelompok ekstremis seperti Al-Qaeda atau lainnya beroperasi di wilayah Afghanistan. Kemudian, AS di bawah kepemimpinan presiden Joe Biden tetap melanjutkan kesepakatan dengan Taliban dan mengumumkan pada April 2021 bahwa seluruh sisa-sisa pasukan AS akan menarik diri dari negara Afghanistan pada 11 September, dua dekade setelah dimulainya wilayah tersebut. Taliban mulai merebut sebagian besar wilayah Afghanistan. Penyerangan terus berlanjut hingga penindasan pemerintah di Afghanistan setelah penarikan militer AS. Taliban menguasai Afghanistan hanya dalam waktu 10 hari, mengambil alih ibu kota provinsi pertama mereka pada 6 Agustus. Pada tanggal 15 Agustus, mereka sudah berada di gerbang Afghanistan. Serangan kilat mereka meruntuhkan pemerintahan Taliban yang didukung oleh Amerika Serikat. Kembalinya Taliban ke pemerintahan mengakhiri hampir 20 tahun kehadiran pimpinan AS di negara itu (BBC, 2021).

Setelah Taliban kembali menguasai negara tersebut pada tahun 2021, Tiongkok, seperti negara-negara lain pada tahun 2024, tidak mengakui kembali Imarah Islam namun mengizinkan kedutaan besarnya untuk beroperasi di negara tersebut. Meskipun Tiongkok belum secara resmi mengakui

Taliban sebagai pemerintah baru Afghanistan, Tiongkok mengeluarkan pernyataan pada awal setelah pengambilalihan kekuasaan Taliban yang mengatakan bahwa mereka menghormati hak rakyat Afghanistan untuk secara mandiri menentukan nasib mereka sendiri dan akan mengembangkan hubungan persahabatan dan kerja sama dengan Afghanistan-Tiongkok dimana Tiongkok ingin tampil di pemerintahan Afghanistan yang dapat mengkonsolidasikan posisi di wilayah tersebut (Bo, 2021).

Rumusan Masalah

Apa kepentingan nasional Tiongkok pada Afghanistan pasca mundurnya pasukan Amerika Serikat di tahun 2021 ? Skripsi ini akan menganalisa pendekatan Tiongkok ke Afghanistan dengan konsep *national interest*.

B. Kerangka Teori

1. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan sebuah konsep yang sering dibahas dalam kajian dan permasalahan hubungan internasional. Setiap negara akan selalu mempunyai kepentingan nasional yang seringkali menjadi landasan bagi mereka dalam mengembangkan strategi hubungan internasionalnya. Kepentingan nasional mengacu pada serangkaian tujuan, sasaran, dan prinsip-prinsip yang diprioritaskan dan diupayakan oleh suatu negara dalam interaksinya dengan negara lain dan dalam pengelolaan kepentingannya sendiri. Hal ini mencakup berbagai faktor termasuk keamanan, ekonomi, kedaulatan, integritas wilayah, dan pemajuan nilai-nilai dan cita-cita yang dianggap penting bagi identitas dan kesejahteraan bangsa. Para ahli mempunyai pendapat yang berbeda-beda dalam menafsirkan dan mendefinisikan kepentingan nasional. Menurut Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara dalam melindungi dan memelihara identitas fisik, politik dan budaya dari gangguan negara lain. Menurut Morgenthau, pemimpin negara merumuskan kebijakan khusus terhadap negara lain yang bersifat kooperatif atau konfliktual (Alstynne and Morgenthau 1951).

Kepentingan nasional mencakup aspek ekonomi dan keamanan yang sangat penting bagi kemakmuran, kedaulatan, dan stabilitas suatu negara. Dari segi ekonomi, hal ini melibatkan dorongan terhadap pertumbuhan yang kuat, menjaga stabilitas, dan meningkatkan daya saing di pasar global. Langkah-langkah seperti menerapkan kebijakan ekonomi yang strategis, mengalokasikan investasi pada infrastruktur dan inovasi, serta memastikan akses terhadap sumber daya krusial menjadi bagian dari strategi ekonomi nasional. Dari segi keamanan, menjaga kepentingan nasional melibatkan pertahanan terhadap ancaman eksternal, memastikan integritas wilayah, dan menjaga stabilitas internal.

Ini mencakup memiliki kemampuan pertahanan yang handal, operasi intelijen yang efektif, serta kerja sama dengan sekutu dalam menghadapi tantangan keamanan bersama. Melawan ancaman baru seperti serangan siber dan terorisme juga menjadi fokus utama dalam menjaga kedaulatan nasional dan menciptakan perdamaian serta stabilitas.

Setelah pengambil-alihan Taliban di Afghanistan tahun 2021, Tiongkok adalah negara asing pertama memberikan respon positif dan menjanjikan bantuan kemanusiaan darurat senilai 200 juta yuan ke Afghanistan (ABC NEWS, 2021). Afghanistan memiliki cadangan yang diperkirakan bernilai 1 triliun dollar atau lebih, yang mungkin merupakan cadangan litium terbesar di dunia, komponen penting untuk baterai penyimpan energi yang mendorong transisi dunia dari bahan bakar fosil (Najafizada, 2021). Tiongkok memiliki alasan kuat untuk mendekati Afghanistan karena cadangan lithiumnya yang melimpah penting untuk produksi mobil listrik dari Tiongkok. Posisi geografi yang strategis dari Afghanistan juga menjadikan wilayah ini penting bagi kepentingan ekonomi Tiongkok dalam proyek Belt Road Initiative (BRI) dan China-Pakistan Economic Corridor (CPEC).

Tak hanya di sektor ekonomi, Tiongkok juga memiliki kepentingan perihal keamanan di wilayah Afghanistan. Keamanan Afghanistan merupakan faktor penting bagi stabilitas dan keamanan Tiongkok sendiri. Tiongkok khawatir bahwa kekerasan di Afghanistan dapat meluas ke Asia Tengah dan menimbulkan potensi ancaman bagi provinsi Xinjiang. Tiongkok khawatir akan penyebaran ekstremisme Islam di antara minoritas Uyghurnya sendiri. dan mengingat *East Turkestan Islamic Movement* (ETIM) telah aktif di Afghanistan. ETIM adalah kelompok militan bersenjata yang menginginkan negara Islam merdeka di Xinjiang yang disebut Turkestan Timur, istilah yang digunakan orang Uygur untuk wilayah tersebut. Tiongkok menuduh ETIM melakukan sejumlah serangan teror mematikan di seluruh Tiongkok dan di negara lain, dan mengklaim memiliki hubungan dengan al-Qaeda dan Taliban. Tiongkok khawatir akan kemungkinan dampak kelompok itu pada kegiatan separatis di Xinjiang (Zhen, 2020).

2. Konsep politik luar negeri

Politik Internasional dapat didefinisikan sebagai proses mempengaruhi, memanipulasi atau mengendalikan kelompok-kelompok besar di dunia, untuk menjaga dan memajukan kepentingan beberapa pihak melawan pertentangan dari pihak lain. Norman J. Padelford dan George A. Lincoln dalam bukunya *The Dynamics of International Politics* mendefinisikan Politik Internasional sebagai sebuah interaksi masing-masing negara-bangsa di mengejar kepentingan nasional yang mereka anggap dan tujuan (Padelford & Lincoln., 1963).

Henry Kissinger, seorang ahli dalam hubungan internasional yang terkemuka, memiliki pandangan terhadap politik luar negeri dimana urusan luar negeri harus menggunakan pendekatan pragmatis dalam menyeimbangkan kekuasaan dan mendorong solusi diplomatik terhadap konflik. Henry Kissinger meyakini bahwa politik luar negeri harus mengutamakan kepentingan nasional. Bahkan menggunakan kekuatan militer bila diperlukan. Ia percaya akan pentingnya diplomasi dan negosiasi namun juga menyadari bahwa kekerasan dapat menjadi alat yang diperlukan dalam hubungan internasional (Papp, 2001).

Tiongkok sejak lama telah mengadopsi praktik politik luar negeri yang pragmatis. Praktik ini lahir dari analisa mendalam dari kelebihan dan kelemahan internal negara tersebut dengan negara lain. Deng Xiaoping menggantikan pemikiran Mao Zedong dari yang lebih ideologis menjadi kearah pragmatis. Deng Xiaoping memperkenalkan filosofi “teori kucing” yang menyatakan bahwa tidak penting kucing itu berwarna hitam ataupun putih, yang penting kucing itu bisa menangkap tikus maka itu adalah kucing yang baik. Pragmatisme Tiongkok mulai dipandu oleh Deng Xiaoping yang diterapkan ketika dimasa perang dingin ketika Tiongkok mulai mendekati ke Amerika Serikat. Hal ini dilakukan Tiongkok untuk mengimbangi pengaruh Uni Soviet dan juga Tiongkok mengubah arah politik luar negerinya bersamaan dengan pergantian rezim dari Mao Zedong ke Deng Xiaoping. (Keith 1985).

Pendekatan yang lebih pragmatis ini juga diterapkan pada hubungan luar negeri antara Tiongkok dan Afghanistan sejak lama. Tiongkok sempat memiliki hubungan yang naik turun dengan Afghanistan. Ketika Taliban berkuasa di tahun 1990-an, Tiongkok tidak menyambut hangat hal tersebut karena terdapat dugaan kelompok ekstrimis islam pemberontak Uighur dari wilayah Tiongkok yaitu Xinjiang, telah bergabung dengan Taliban. Kemudian, lengsernya posisi Taliban setelah intervensi militer dari Amerika Serikat pasca peristiwa 9/11, Tiongkok kembali memulai hubungan baik dan kerja sama dengan pemerintah Afghanistan yang baru. Berbagai kerja sama dibidang pengembangan infrastruktur dan tambang mulai dilakukan kedua belah. Namun sejak tahun 2014, Tiongkok membuka komunikasi dan hubungan dengan kelompok Taliban di Afghanistan. Hal ini dikarenakan Tiongkok semakin merasa tidak aman terhadap kehadiran AS di sepanjang perbatasan baratnya dengan Afghanistan. Oleh karena itu, Tiongkok memosisikan dirinya sebagai fasilitator perdamaian dan mulai mengembangkan hubungan baik dengan Taliban, sekaligus secara terbuka mendukung Republik Islam yang saat itu berdiri di Kabul. Tiongkok, dengan strateginya mengurangi kekerasan melalui diplomasi, investasi, dan proyek pembangunan, memandang keterlibatan militer AS sebagai ancaman geostrategis. (Small, 2015)

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka teori diatas, maka hipotesa yang ditulis oleh penulis mengenai kepentingan nasional Tiongkok terhadap Afghanistan, yaitu mundurnya militer AS dari Afghanistan dan naiknya Taliban ke pucuk kekuasaan membuat Tiongkok diposisi menguntungkan untuk mencapai kepentingan nasional dan memperluas pengaruhnya ke Afghanistan yang mana selama ini hal tersebut tidaklah mudah dikarenakan terdapat pengaruh AS dan konflik internal antar faksi di Afghanistan.

E. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa kepentingan nasional negara Tiongkok terhadap Afghanistan pasca ditariknya pasukan Amerika Serikat pada tahun 2021 lalu.

F. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi masalah yang akan diteliti, penulis hanya akan berfokus pada pembahasan apa yang menjadi kepentingan nasional Tiongkok terhadap Afghanistan dengan rentang waktu penelitian yaitu pada tahun 2021-2023. Hal tersebut dikarenakan hingga saat ini hubungan negara Tiongkok dan Afghanistan (Taliban) masih terjalin dan berlanjut.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah Tiongkok, Afghanistan, dan sekitarnya. Hal ini sesuai dengan konteks dari judul penelitian ini. Karena itulah penulis akan membawakan kepentingan nasional dari negara Tiongkok kepada Afghanistan pasca penarikan militer AS di tahun 2021.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini mengutamakan riset yang bersifat deskriptif dan analitis dengan pendekatan induktif. Penelitian ini mengutamakan proses dan makna (perspektif subjek) pada metode kualitatif. Fokus penelitian akan disesuaikan dengan fakta sebenarnya di lapangan dengan memanfaatkan landasan teori.

Penulis menggunakan sumber daya sekunder yang didapatkan dari sumber lain, bukan sumber primer yang berasal dari sumber asli pertama. Sumber didapatkan melalui teks, dokumen, contohnya seperti jurnal ilmiah, artikel, buku, media elektronik, media cetak, maupun

website resmi yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini akan memakai teknik pengumpulan melakukan analisa studi pustaka (*Library Research*) dari informasi atau data-data yang terkait dengan topik pembahasan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi kedalam 4 bab, antara lain adalah:

Bab I : Berisi Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Berisi ketertarikan dan niat Tiongkok untuk bekerja sama dengan pemerintah Afghanistan untuk proyek pengembangan infrastruktur Belt and Road Initiative (BRI) untuk membangun stabilitas politik dan ekonomi. Selain itu, Bagi Tiongkok, stabilitas di Afghanistan juga merupakan prasyarat bagi perkembangan dan keberhasilan Tiongkok Pakistan Economic Corridor (CPEC untuk membangun fasilitas infrastruktur baru yang dapat menghubungkan Gwadar ke Asia Tengah

Bab III : Berisi kepentingan Tiongkok di sektor keamanan Afghanistan yang memengaruhi stabilitas Tiongkok. Hal ini karena keberadaan East Turkestan Islamic Movement (ETIM) di Afghanistan. ETIM berupaya memisahkan Xinjiang dari Tiongkok. Organisasi ini juga telah melakukan serangan teror di Tiongkok dan memiliki keterkaitan dengan al-Qaeda dan Taliban. Kerja sama regional menjadi penting bagi Tiongkok untuk mencegah Afghanistan menjadi basis teroris dan memperlemah posisi ETIM.

Bab IV: Berisi kesimpulan terkait keseluruhan isi materi dari bab-bab sebelumnya